

KONSEP PENILAIAN HASIL BELAJAR PERENIALISME DAN IMPLEMENTASINYA DI MADRASAH

*Muhammad Nasir**

Abstract ;

There is a tendency of some communities in Indonesia has always made the learning outcomes in the form of the final value to measure educational success, even being the only measure used to justified intelligence of a learner. Children who are considered smart and smart is just a child or children who have ranked highest. While children who have a low value is considered not successful and failed in learning. In this case, some of our communities less attention to aspects of children's behavior in the form of the attitude of honesty, hard work, creativity, independence, thinking skills and responsibilities and others. Noting the tendency of some communities, the authors saw that the assessment perenialisme still a dominant aspect in the assessment at the schools, including madrasah. This paper attempts to explore how the concept of assessment of learning outcomes perenialisme in madrasah, which is presented by first seeing perenialisme as one of the schools of philosophy of education. Next in succession, the flow is presented that supports education, orientation and model concepts relevant curriculum, policies and implementation of assessment in Madrasah

Key Words : Penilaian, Hasil Belajar, Perenialisme dan Madrasah

A. PENDAHULUAN

Salah satu gejala yang menjadi perbincangan di kalangan pemerhati pendidikan adalah adanya kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia menjadikan hasil belajar dalam bentuk nilai akhir menjadi ukuran keberhasilan pendidikan, bahkan menjadi satu-satunya alat ukur yang dipakai untuk menjustifikasi kecerdasan seorang peserta didik. Anak yang dianggap cerdas dan pintar hanyalah anak yang memiliki nilai raport yang tinggi atau anak menduduki peringkat tertinggi, sementara anak yang memiliki nilai raport yang rendah dianggap tidak berhasil atau gagal dalam belajar. Dalam hal ini, sebagian masyarakat kita kurang memperhatikan aspek perilaku anak berupa sikap kejujuran, kerja keras, kreatifitas, kemandirian, keterampilan berpikir dan tanggung jawab dan lain-lain.

* Penulis adalah Dosen Tetap pada Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAN) Samarinda Kalimantan Timur, sedang menempuh S3 di UPI Bandung.

Dengan kata lain, masyarakat kita lebih ingin mengetahui hasil yang diperoleh dari putra putrinya, bukan mengenai bagaimana peserta didik memperoleh nilai tersebut. Sekolah yang dianggap idola adalah sekolah yang menghasilkan tamatan dengan nilai yang tinggi tanpa memperhatikan kemampuan sekolah dalam menghasilkan nilai-nilai tersebut. Hasil belajar selalu menjadi yang utama dan pertama.¹ .

Melihat gejala di atas, penulis dapat menduga kuat bahwa kecenderungan masyarakat tersebut sangat identik dengan penilaian hasil belajar yang berbasis perenialisme. Penilaian perenialisme dalam hal ini, menekankan penilaiannya pada; a) penggunaan ujian dan tes kemampuan dan skill. Kualitas pembelajaran dinilai dengan penilaian yang tinggi dan penilaian penampilan peserta didik menjadi cukup luas; b) perolehan dan aplikasi konsep melalui tes dan penggunaan situasi pemecahan masalah; c) penggunaan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Dalam bidang studi humaniora misalnya, lebih banyak digunakan bentuk uraian (*essay test*) dari pada tes objektif. Bidang studi ini membutuhkan jawaban yang merefleksikan logika dan menyeluruh; d) penggunaan tes untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap bahan ajar yang telah ditentukan dan e) siswa yang berhasil adalah siswa yang menguasai ilmu secara keseluruhan atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru.

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa penilaian yang berbasis proses masih sangat kurang mendapat perhatian baik oleh orang tua siswa, masyarakat maupun para guru. Padahal, seorang anak yang dianggap berhasil adalah anak yang memiliki kecerdasan baik intelektual maupun sikap dan psikomotorik. Mengukur berbagai kecerdasan siswa tersebut tidak cukup hanya dengan penilaian yang berbasis hasil tetapi juga dilakukan dengan penilaian yang berbasis proses. Tulisan ini mencoba mengeksplor bagaimana konsep penilaian hasil belajar perenialisme dan bagaimana implementasinya di Madrasah.

B. PERENIALISME DALAM TIPOLOGI PEMIKIRAN

M. Amin Abdullah menyebutkan bahwa ada empat model pemikiran keislaman, yaitu model tekstual salafi, model tradisional mazhab, model modernis dan model neo modernis. Dari empat model ini, tekstual salafi dianggap lebih dekat dengan perenialisme. Tektual salafi berupaya memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung di dalam Alquran dan Sunnah dengan melepaskan diri dari dan kurang mempertimbangkan situasi kongkrit dinamika pergumulan masyarakat. Masyarakat ideal yang diinginkan adalah masyarakat era masa Nabi Muhammad saw. dan para sahabat yang menyertainya. Rujukan utama

¹Hasan, S.Hamid, *Evaluasi Kurikulum*., (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008) hal. 182

dari pemikirannya adalah kitab Suci Alquran dan kitab-kitab klasik tanpa menggunakan pendekatan keilmuan yang lain. Perbedaan model ini dengan perenial terlihat dari sisi keinginan kaum perenial untuk kembali kepada jiwa yang menguasai abad pertengahan, sementara tekstual salafi lebih kepada era Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya.

Berbeda dengan Abdullah di atas, Muhaimin justru membagi tipologi pemikiran filsafat Islam itu ke dalam lima kelompok, yaitu perenial esensial salafi, perenial esensial mazhab, modernis, perenial esensial kontekstual faslisifikatif, dan rekonstruksi sosial yang berlandaskan tauhid. Dari kelima tipologi tersebut, dua di antaranya sesuai dengan perenialisme dalam bahasan tulisan ini yaitu perenial esensial salafi dan perenial esensial mazhab, meskipun memiliki perbedaan dengan istilah salafi dan mazhab. Berikut ini ciri-ciri pemikiran kedua tipe pemikiran tersebut untuk kemudian membandingkannya dengan perenialisme dan esensialisme.

Tabel 1
Tipologi Pemikiran
Perenial Esensial Salafi dan Perenial Esensial Mazhab²

No.	Tipologi Pemikiran Keislaman	Parameter	Ciri-Ciri Pemikiran	Fungsi Pendidikan Islam
01.	Perenial Esensial Salafi	1. Bersumber dari Alquran dan sunnah /hadis 2. Regresif ke masa salaf 3. Konservatif mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai era salaf 4. Wawasan kependidikan Islam yang berorientasi ke masa silam (salaf)	1. Menjawab persoalan pendidikan Islam dalam konteks wacana salafi 2. Memahami nash dengan cara kembali ke masa salafi secara tekstual 3. Memahami ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadis, hadis	1. Melestarikan nilai dan budaya masyarakat salaf, karena ia dipandang sebagai masyarakat ideal 2. Pengembangan potensi dan interaksinya dengan nilai dan budaya masyarakat

²Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 109 -110

			dengan hadis lain dan kurang adanya elaborasi dan pengembang.	salafi
02.	Perenial Esensial Mazhab	1. Bersumber dari Alquran dan sunnah /hadis 2. Regresif ke masa salaf /klassik 3. Konservatif dengan mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai dan pemikiran para pendahulunya yang dianggap mapan 4. Wawasan kependidikan Islam yang tradisional dan berorientasi ke masa silam	1. Menekankan pada pemberian syarah dan hasyiyah atau kutipan terhadap pemikiran pendahulunya 2. Kurang ada keberanian untuk mengkritisi atau mengubah substansi materi pemikiran para pendahulunya.	1. Melestarikan dan mempertahankan nilai dan budaya serta tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya 2. Pengembangan potensi dan interaksinya dengan nilai dan budaya masyarakat terdahulu.

C. KONSEP PENILAIAN HASIL BELAJAR PERENIALISME

Penilaian hasil belajar Perenialisme tentu saja mengikuti teori pendidikan klasik, model konsep kurikulum dan pandangan filsafatnya yang beranggapan bahwa posisi siswa menurut perenialisme adalah pasif, tunduk, lemah secara kognitif, penerima informasi, tetapi harus berusaha keras untuk menguasai pengetahuan, fakta dan keterampilan, sementara posisi guru adalah aktif, pentransfer ilmu, model dan ahli. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar bagi perenialisme adalah; a) menggunakan ujian dan tes kemampuan dan skill. Kualitas pembelajaran dinilai dengan penilaian yang tinggi dan penilaian penampilan peserta didik menjadi cukup luas; b) perolehan dan aplikasi konsep melalui tes dan penggunaan situasi pemecahan masalah; c) penggunaan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Dalam bidang studi humaniora misalnya, lebih banyak digunakan bentuk uraian (*essay test*) dari pada tes objektif. Bidang studi ini membutuhkan jawaban yang merefleksikan logika dan menyeluruh; e) Penggunaan tes untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap bahan ajar yang telah ditentukan; f) siswa yang berhasil adalah siswa yang

menguasai ilmu secara keseluruhan atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru

Jika dikaitkan dengan model penilaian pembelajaran, tampaknya penilaian perenialisme dengan model konsep kurikulum subjek akademiknya di madrasah menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Norma (PAN). Sebagaimana diketahui bahwa di dalam model Penilaian pembelajaran dikenal dua istilah yang familiar yaitu Penilaian Acuan Norma (PAN) atau Kelompok (*norm/group referenced evaluation*) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP) (*creterian referenced evaluation*). Secara ideal, di madrasah yang dinilai bukan hanya menghafakan surah-surah dan hadis, namun siswa juga harus rajin mengaji, rajin shalat dan sikap-sikap positif lainnya. Oleh karena itulah, perlunya dikembangkan model evaluasi Acuan Etik yang disebut sebagai Penilaian Acuan Etik (PAE) oleh Muhaimin³. Berikut ini akan dijelaskan asumsi dan implikasi dari ketiga bentuk penilaian di atas sebagai berikut :

Pertama, penilaian Acuan Kelompok (PAN) dengan asumsi bahwa adanya pengakuan terhadap perbedaan individu, adanya kesejajaran antara matematik dan alam semesta dengan contoh apabila barang ditambah maka pasti berubah, sebaliknya juga begitu. Oleh karena itu, hasil belajar juga dapat bertambah dan berkurang dan adanya normalitas distribusi populasi. Implikasinya dalam pembelajaran adalah : a) Kemampuan pembelajaran peserta didik lebih diutamakan dari pada penguasaan materi; b) proses belajar mengajarnya menggunakan CBSA yaitu mengembangkan kompetisi sehat antar siswa; c) kreteria berkembang sesuai dengan kelompoknya.

Kedua, Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan asumsi bahwa : harapan adanya perbedaan sebelum dan sesudah belajar dan harapan siswa memiliki kemampuan sesuai dengan yang dipelajari. Implikasinya dalam pembelajaran adalah a) tujuan pembelajaran adalah kemampuan penguasaan materi dan kemampuan menjalankan tugas-tugas tertentu lebih diutamakan; b) proses belajar yang digunakan adalah, paket, belajar tuntas, modulasi, dan belajar mandiri; c) kreteria penilaiannya sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Ketiga, Penilaian Acuan Etik (PAE) dengan asumsi bahwa manusia asalnya adalah fitrah, pendidikan berusaha mengembangkan atau mengaktualisasikan fitrah itu dan bersatunya iman, ilmu dan amal. Implikasinya adalah; a) tujuan pembelajaran adalah menjadi manusia yang "baik" bermoral, beriman dan bertakwa; b) proses belajar mengajarnya adalah sistem mengajar berwawasan nilai; c) kreterianya adalah kreteria baik dan benar secara mutlak.⁴

³ Muhaimin, *Ibid*

⁴ Muhaimin. *Ibid*. hal. 53-54

Sementara kriteria penilaiannya adalah harus memiliki validitas dan reliabilitas. Validitas tes artinya penilaian hasil belajar yang dilakukan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan alat yang dapat dipercaya, tepat, atau sah. Hal ini berarti penilaian yang digunakan harus sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan isinya mencakup semua kompetensi yang terwakili secara proporsional. Satu contoh adalah untuk menilai kompetensi berbicara, maka penilaian yang valid adalah menggunakan tes lisan, jika menggunakan tes tertulis, maka penilaian menjadi tidak valid.

Sementara reliabilitas adalah konsistensi atau keajegan hasil penilaian. Reliabilitas atau keterandalan atau ketetapan, atau ketelitian suatu alat evaluasi berarti bahwa tes dapat mengukur kemampuan seorang anak didik secara mantap. Suatu tes dikatakan terandal atau reliabel apabila menghasilkan skor yang dapat dipercaya, konsisten setelah diberikan berkali-kali atau berturut-turut. Jadi yang dipentingkan adalah ketelitian yaitu sejauh mana tes atau alat tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Untuk menilai mutu suatu tes yang kita buat, banyak ahli menyebutkan kriteria tertentu, seperti Hamalik dengan empat ciri yaitu; a) validitas; b) reliabilitas; c) objektivitas dan d) efisiensi.⁵ Ada banyak pertimbangan khusus untuk mengevaluasi sebuah tes, namun menurut Thorndike, R.L (1977) dalam Mudjiojo mempertimbangkan tiga hal utama untuk mengevaluasi sebuah tes yaitu; a) *respectively* (keterurutan); b) *validity* (validitas); c) *reliability* (keterandalan) dan d) *practicality* (kepraktisan). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gronlund (1968) dalam Mudjiojo sebagai berikut; "... sebuah program pengevaluasian harus memiliki beberapa karakteristik umum tertentu. Karakteristik yang paling penting dapat dikelompokkan yaitu *validity*, *reliability* dan *usability*.⁶ Selain bentuk tes yang menekankan pada aspek intelektual, esensialisme juga menggunakan bentuk tes keterampilan atau untuk kerja, menyingkat aliran pendidikan ini menekankan pada aspek pendidikan vokasional bagi peserta didiknya. Ada dua hal yang berkaitan dengan penilaian unjuk kerja yaitu keterampilan (*skill*) dan kinerja (*Performance*).

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep penilaian hasil belajar bagi perenialisme adalah menggunakan jenis tes tulisan (esai dan objektif), tes lisan, dan tes perbuatan

D. KEBIJAKAN PENILAIAN HASIL BELAJAR DI MADRASAH

Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan di Indonesia kaitannya dengan penilaian hasil belajar, baik yang menekankan pada isi maupun yang menekankan

⁵Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000), hal. 46

⁶Mudjiojo. *Tes Hasil Belajar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hal. 53

pada proses. Kebijakan yang menaekankan pada isi atau penguasaan materi oleh peserta dapat terlihat misalnya dengan adanya penekanan pada pencapaian kompetensi menjadi ukuran kelulusan siswa di madrasah dengan diberlakukannya Standar kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Lulusan Kelompok Mata Pelajaran (SKL-MP), Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran (SKL-MP). Pada level berikutnya, muncul istilah Ketuntasan belajar yang dikenal dengan Kreteria Ketuntasan Minimal dan sistem penilaian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), maka ditetapkan adanya tiga Standar Kompetensi Lulusan yaitu; a) Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP); b) Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SKL-MP) dan Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran (SKL-MP).

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni: a) Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut; b) Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut; c) Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni: a) Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. b) Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. c) Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan untuk mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik.

Pada level berikutnya dikenal dengan istilah Ketuntasan Minimal Belajar (KMB). Ketuntasan Minimal Belajar (KMB) peserta didik ditetapkan oleh musyawarah guru bidang studi berdasarkan acuan yang ditetapkan oleh

SD/MI/SDLB, SMP/MTs./SMPLB atau SMA/SMK/MA masing-masing. Penetapan Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) atau Kreteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada tiap mata pelajaran berbeda-beda setelah memperhitungkan tingkat kompleksitas, daya dukung dan intake atau kemampuan rata-rata peserta didik.⁷

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian standar kompetensi yang telah ditetapkan melalui kebijakan, maka diperlukan pula sebuah sistem penilaian. Sistem penilaian merupakan suatu prosedur dan kreteria-kreteria penilaian yang diberlakukan di satuan pendidikan. Sistem penilaian ini berfungsi untuk mengendalikan proses dan hasil belajar peserta didik dengan mengacu pada : standar penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah, mengacu pada Ketetapan Kreteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKBM), dan mengacu pada kreteria kenaikan kelas. Sebagai contoh berikut ini akan dikemukakan sistem penilain di madrasah sebagai berikut : a) penilaian dilakukan dengan mengacu pada kreteria hasil penilaian proses, ujian blok dan ujian madrasah; b) penentuan kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran; c) siswa dinyatakan tidak naik kelas, apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal, lebih dari tiga mata pelajaran; d) siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal lebih dari tiga mata pelajaran yang bukan mata pelajaran ciri khas program studi; e) siswa yang tidak naik kelas diwajibkan mengulang, yaitu mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran pada tingkat kelas yang sama pada tahun pelajaran berikutnya; f) laporan hasil belajar siswa disampaikan kepada siswa dan orang tua/wali siswa tiap akhir semester⁸.

Kebijakan lain yang terkait dengan penilaian hasil belajar adalah kreteria kelulusan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah. Seorang siswa yang dinyatakan lulus adalah apabila siswa tersebut memenuhi dua aspek yaitu;

1. Aspek akademik. Aspek akademik ini meliputi; a) memiliki nilai rapor yang lengkap untuk kelas 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga); b) telah memiliki nilai ujian untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan; c) tidak terdapat nilai $\leq 4,25$ baik untuk ujian tulis maupun ujian praktek seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah tidak boleh $\leq 4,50$.
2. Aspek Non-Akademik yang meliputi : a) nilai rata-rata kepribadian (kelakuan, kerajinan, dan kerapian) pada semester II kelas III minimal baik. b) Kehadiran di sekolah pada semester I dan II kelas III minimal 90 % dari jumlah hari efektif.⁹

⁷Departemen Pendidikan Nasional., *Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)*. hal. 1-32.

⁸Muhaimin dan kawan kawan, *Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Sekolah dan Madrasah*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 366-368.

⁹ *Ibid.* hal. 370-371

Berdasarkan gambaran yang berkaitan dengan kebijakan penilaian hasil belajar di madrasah tersebut, penulis dapat memahami bahwa pada prinsipnya Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMK), Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP), Kreteria Kelulusan Belajar Minimal (KKBM), Panilian Acuan Patokan (PAP), validitas dan reliabelitas dan kreteria kelulusan Ujian Nasional serta Ujian Sekolah menghendaki peserta didik agar bekerja keras untuk menguasai bahan ajar sebanyak-banyaknya seperti yang telah ditentukan melalui standar kompetensi, kompetensi dasar dan Indikator Pencaian Hasil belajar. Dengan demikian, penulis memahami bahwa kebijakan penilaian tersebut, masih sangat kental dengan konsep dan nuansa perenialisme sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya, tentu dengan tidak menafikan adanya model penilaian hasil belajar yang lain seperti penilain yang terpusat pada proses dan lain-lain.

E. IMPLEMENTASI PENILAIAN HASIL BELAJAR PERENIALISME DI MADRASAH

Secara konsep dan kebijakan, sebenarnya konsep penilaian hasil belajar perenialisme telah diterapkan di madrasah selama ini, dan memang saat ini telah menjadi bagian dari penilaian hasil belajar di madrasah. Hal ini terlihat pada penekanan pada aspek intelektual dibandingkan aspek yang lain, penekanan pada isi materi yang harus dikuasai, dan indikator kesuksesan siswa terletak pada penguasaan materi, nilai, fakta dan keterampilan. Penekanan ini dilakukan agar peserta didik menguasai pengetahuan, fakta dan keterampilan (bersifat akademik) yang diajarkan oleh guru agar peserta didik menguasai materi dan memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penekanan ini, maka dalam pelaksanaanya peserta didik dituntut untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk menguasai bahan pelajaran dan keterampilan yang telah ditentukan oleh guru sebagai pentransfer ilmu.

Dalam kasus madrasah misalnya, siswa harus bisa menghafal, menterjemahkan dan mengetahui kandungan ayat-ayat Alquran dengan baik sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik. Siswa juga harus bisa menghafal, menterjemahkan dan memahami kandungan hadis-hadis Rasulullah saw. yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang telah menjadi rujukan utama dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan baik dan benar. Demikian pula, siswa harus bisa menguasai bahan atau isi bahan pelajaran yang lain seperti Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqh dan lain-lain. Oleh karena itu, siswa yang tidak mampu mencapai kreteria ketercapaian minimal yang telah ditetapkan oleh guru, maka dia dianggap tidak berhasil dalam pembelajaran.

Dengan demikian, persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata yang tidak dapat memenuhi kriteria ketercapaian nilai minimal, tetapi ia sesungguhnya telah mengamalkan kandungan ayat dan hadis yang telah dipelajarinya.? Sebaliknya bagaimana dengan anak yang secara intelektual sangat cerdas dan terampil dengan menghafal materi, menguasai kandungan ayat dan hadis tetapi secara emosional dan sikap justru rusak atau sangat buruk. Dengan kata lain, ia justru tidak mengamalkan ayat dan hadis yang telah ia kuasai. Oleh karena itu, diperlukan bentuk penilain yang dapat mengakomodasi keragaman dan karakteristik peserta didik. Selain itu, Penilaian hasil belajar perenialisme di madrasah terkesan sangat menekankan pada hasil, bukan pada proses. Dengan penekanan ini, persoalannya adalah mungkinkah evaluasi yang dilakukan dalam waktu yang singkat dapat memberikan gambaran yang benar tentang perkembangan dan penguasaan siswa. Dengan demikian, penilaian di madrasah hendaknya menekankan pada keduanya yaitu penilaian berbasis hasil dan penilaian berbasis proses.

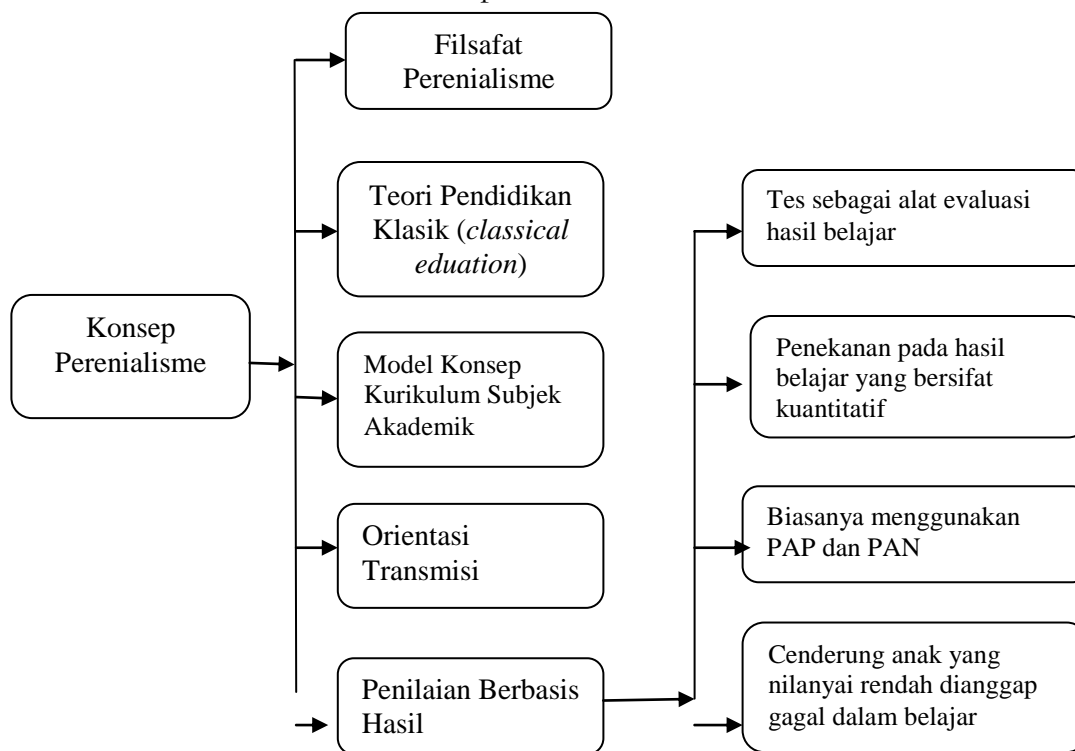
Beberapa persoalan lain yang muncul ketika penilaian hasil belajar perenialisme secara mutlak diimplementasikan tanpa didukung oleh model penilaian lainnya adalah :

1. Disiplin ilmu atau mata pelajaran yang sangat banyak dan terpisah-pisah di madrasah tentu penguasaan peserta didik menjadi dangkal dan atau tidak mendalam. Oleh karena itu, untuk penguasaan yang cukup mendalam tentu dibutuhkan materi yang sedikit. Sementara mempelajari disiplin ilmu yang sedikit, dampaknya tentu penguasaan siswa terbatas dan sukar menerapkan dalam kehidupan masyarakat yang luas serta materi yang akan diajarkan bersifat universal.
2. Mengingat posisi guru adalah model, pentranfer ilmu, pengatur, aktif, bertanggungjawab, penyalur pengetahuan yang baik, penentu materi, metode, dan evaluasi serta bertanggungjawab terhadap seluruh wilayah pembelajaran, maka profesionalitas guru merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu, persoalan yang muncul kemudian adalah tidak semua guru dapat memiliki kriteria yang diinginkan oleh konsep perenialisme. Dengan demikian, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga harus bisa mengembangkan kurikulum yang memungkinkan para calon guru di madrasah untuk menjadi guru yang profesional. c) Dalam konteks madrasah, meskipun penilaian formatif dan sumatif dianggap mampu mengukur kompetensi siswa, lagi-lagi keduanya dalam aplikasinya masih berpatokan pada hasil dengan diberlakukannya Kriteria Standar Minimal dan kebijakan-kebijakan lainnya. Oleh karena itu, penilaian yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan anak perlu dipertimbangkan untuk dilakukan. Penilaian Acuan Etik (PAE) adalah salah satu solusinya. Dengan Penilaian

Acuan Etik (PAE) ini, tentu keberhasilan seorang peserta didik tidak semata-mata karena nilainya tinggi, tetapi kelulusan seorang siswa tentu diukur dari berbagai aspek, tentu termasuk aspek perilaku dan pengamalan dia terhadap apa yang ia pelajari.

Untuk melihat bagaimana alur pemikiran kaum perenilis dalam pendidikan, sekaligus alur pembahasan makalah terutama yang terkait dengan penilaian hasil belajarnya, maka penulis menggambarkan secara sederhana pada gambar di bawah ini;

Gambar 1
Peta Konsep Pemikiran Perenilialis



F. PENUTUP

Penilaian yang dilakukan di madrasah seharusnya tidak hanya menekankan pada hasil semata-mata berupa nilai, angka di atas kertas, tetapi penilaian yang menyeimbangkan antara penilaian berbasis nilai dengan penilaian berbasis proses. Para guru madrasah harus mulai menggunakan bentuk penilaian yang menekankan pada proses, kreatifitas, kemandirian, kerja keras, kedisiplinan, dan berbagai kemampuan lainnya. Dengan mengkombinasikan penilaian yang menekankan pada hasil dan penilaian yang menekankan pada proses, maka tentu masyarakat tidak terbiasa dengan cepat menjustifikasi anak yang pintar atau anak yang gagal dalam belajar.

BIBLIOGRAFI

- Brameld, Theodore., *Philosophies of Education in Cultural Perspectiv*, Holt, Rinehart and Winston : Toronto : London, 1955
- Departemen Pendidikan Nasional, Materi 10 – Penyusunan KTSP, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 010/0/2000 tentang Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta : Depdiknas, 2000
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)*.
- Fathurrohman, Pupuh dan M. Sobry Sutikno *Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami*. Bandung : Refika Aditama, 2007.
- George, F. Kneller. *Introduction to The Philosophy of Education*, Universitas of California : Los Angeles, 1971.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008.
- _____. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Kunandar. *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam sertifikasi Guru*, Jakarta : Grafindo Persada, 2007.
- Lapp, Diane. et ell. *Teaching and Learning Philosophical, Psychological, Curricular Applications*. London dan New York : Macmillan, 1975.
- Mulyasa, E. *Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhaimin, dan kawan-kawan. *Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Miller, John P. dan Seller, Wayne, *Curriculum Perspective and Practice*, Longman : New York dan London, 1985.

Mudjijo, *Tes Hasil Belajar*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.

Print, Murray. *Curriculum Development and Design*. Second Edition, New South Wales Australia : Allen & Unwin, 1993.

Praja. S. Juhaya. *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Prenadamedia : Jakarta, 2008.

Syaodih, Nana., *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008

Sadulloh, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Alfabeta : Bandung, 2007.

Sanjaya, Wina., *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)*. Jakarta : Kencana, 2005

Sanjaya, Wina., *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP)*. Jakarta : Kencana, 2008